

**PERAN LURAH DALAM PILKADA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melegkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

FAUZI FADHILLAH

NPM 1521020213

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

**PERAN LURAH DALAM PILKADA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melegkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh


FAUZI FADHILLAH

NPM 1521020213

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Marwin, S.H, M.H.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat untuk memilih, jika tidak memiliki identitas maka tidak bisa menggunakan hak suaranya atau ikut memilih. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk provinsi memilih gubernur dan wakil gubernur, untuk kota memilih wali kota dan wakil wali kota, dan untuk kabupaten memilih bupati dan wakil bupati. Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi langsung oleh badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu). Salah satu dasar hukum penyelenggara pilkada adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa tidak boleh ikut serta dalam pilkada dan dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan golongan atau organisasi tertentu. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ASN atau kepala desa tidak boleh ikut kampanye yang tertulis pada Pasal 280 Undang-Undang Pemilu dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa atau perangkat desa. Pemimpin menurut Islam, dikatakan sebagai *Ulul Al-Amr* yang berarti pemilik kekuasaan. Kriteria dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin ialah harus bersifat jujur (*shidq*), dapat dipercaya (*amanah*), memiliki rasa tanggung jawab (*tabliq*), dan memiliki kecerdasan (*fathonah*). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan langsung padalingkungan yang bersangkutan seperti dilatar belakang langsung berinteraksi pada lingkungan yang diteliti. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis bertujuan menggambarkan, melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang bersangkutan. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa aspek antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Seperti adanya dugaan tindakan kecurangan yang terjadi pada pilkada tahun 2018 di kelurahan Tiuh Balak Pasar, kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat kurang simpati pada pilkada. Kesimpulan penelitian, masih adanya dugaan tindakan kecurangan yang terjadi pada pilkada 2018 di kelurahan Tiuh Balak Pasar

Kata kunci: Lurah, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh Siyasah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260


PERSETUJUAN

Nama : Fauzi Fadhillah
NPM : 1521020213
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
**Judul : Peran Lurah Dalam Pilkada Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Kasus pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan
Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten
Way Kanan)**

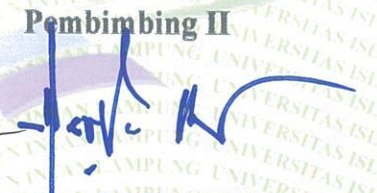
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I


Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERAN LURAH DALAM PILKADA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh **Fauzi Fadhillah, NPM : 1521020213, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam siding munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 16 November 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

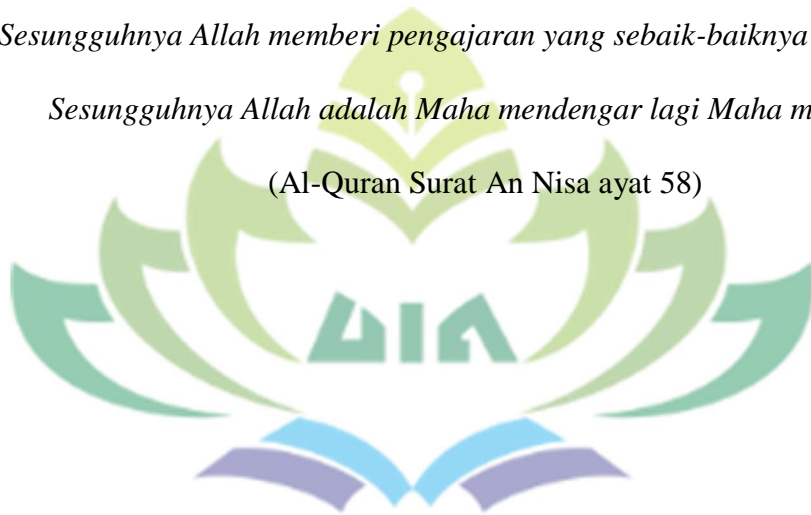
**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002**

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*

(Al-Quran Surat An Nisa ayat 58)



PERSEMBAHAN

Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Ayahanda Drs.Sukirman Hadi, M.M. (Alm), yang kini telah tenang di surga dan bisa bangga melihat putranya kini telah menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana.
2. Ibunda Dra.Siti Thowiyah, S.Pd, M.M. yang telah membesarkan putramu sendiri tanpa lelah dan tanpa mengeluh, telah mendidik dari usia dini hingga dewasa, serta membimbingku. Dan sebagai penyemangatmu untuk menyelesaikan kuliahmu untuk mendapat gelar (Dr.)
3. Kakak saya Empi Ardhianta, S.Kom. ayuk saya Briptu Annisa Nur Fauziah, S.H serta adik saya Akbar Rahman AlHafidz serta ayuk ipar saya Ayu Septaria Putri Semja, S.Pd dan kakak ipar saya Bripka Eko Trimono yang telah mensupport, menyemangati dan mendukung saya hingga selesainya skripsi ini.
4. Saudara/I ku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iiyah Angkatan 2015 yang tidak bias saya sebut satu persatu yang telah membantu saya selama ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak terlupakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Baradatu, pada tanggal 27 September 1997 dan diberi nama Fauzi Fadhillah. Merupakan putra ketiga dari empat saudara dari pasangan Sukirman Hadi(Alm) dan Siti Thowiyah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak (TK) Muslimin Baradatu, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tiuh Balak Pasar pada tahun 2003. Kemudian tahun 2009 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Baradatu dan selesai tahun 2012. Kemudian tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Baradatu dan selesai tahun 2015. Setelah lulus pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2020

Yang membuat,

Fauzi Fadhillah

1521020213

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia -Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“PERAN LURAH DALAM PILKADA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Bapak Marwin, S.H, M.H. selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap civitas akademika dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah E: Ria Dwi Afrida, Fitriani, Elisa Septiona, Mayang, Anggraini, Fitriani, Rima Sinfalina, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa, Nadiyah, Ice, Habib, Ovi, Jodi, Andre, Billi, Yedi, Khomsi Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Teman seperjuangan dari SMP, SMA sampai kuliah Fajar Zakli Iwais, Tito Menabatin, Anissa, Yudia Putri Utami, Hengki Ardiansyah yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2020

Fauzi Fadhillah

NPM 1521020213



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Masalah	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah	13
2. Macam-macam Fiqh Siyasah	21
3. Memilih Pemimpin	23
B. Peran Lurah	
1. Menurut Undang-undang	33
2. Menurut Fiqh Siyasah	40
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah	
1. Partisipasi Masyarakat	43

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	46
D. Tinjauan Pustaka	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Kondisi Demografis	52
B. Peran Lurah Tiuh Balak Pasar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018	60
1. Peran Lurah Dalam Pilkada 2018	60
2. Keadaan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah	74
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Daftar Nama Lurah Kelurahan Tiuh Balak Pasar	51
2. Daftar Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar	53
3. Daftar Agama Penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar	54
4. Daftar Suku di Kelurahan Tiuh Balak Pasar	55
5. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kelurahan Tiuh Balak Pasar	56
6. Daftar Pendidikan Penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar	57
7. Daftar Fasilitas Kelurahan Tiuh Balak Pasar	58
8. Data Pasangan Calon Pilkada 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Tiuh Balak Pasar52
2. Foto Wawancara Lurah Tiuh Balak Pasar
3. Foto Depan Kelurahan Tiuh Balak Pasar dari Dalam Pagar
4. Foto Depan Kelurahan Tiuh Balak Pasar dari Luar Pagar



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul PERAN LURAH DALAM PILKADA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) (Studi Pada Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan makna judul tersebut.

1. Lurah adalah pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.¹
2. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, tetapi jika tidak memenuhi syarat seperti tidak mendapatkan kartu pemilihan karena tidak memiliki identitas kependudukan atau KTP maka tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih.² Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan

²B Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (2011; Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol 1), h,. 57

3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
4. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarnya dari berbagai kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalani suatu bangsa.³

Kesimpulan penegasan judul adalah ingin mengetahui peran Lurah dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan undang-undang dan hukum islam, seperti Mendorong Masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dan melakukan himbauan atau melakukan pengarahan tentang Pilkada bagi Masyarakat yang kurang memahami dunia demokrasi.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul Peran Lurah Dalam Pilkada Perspektik Fiqh Siyasah (Studi Kasus pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

³A.Dijazuli, *fiqh siyasah* (Prenada Media, Jakarta.2000), h. 42.

adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.⁴ Namun, tiap tahun partisipasi masyarakat menurun dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang dilatarbelakangi ketidakpuasan kepada Kepala Daerah yang telah terpilih.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, tetapi jika tidak memenuhi syarat seperti tidak

⁴partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan pemilu (Online), tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all> (11 September 2019)

mendapatkan kartu pemilihan karna tidak memiliki identitas kependudukan atau KTP maka tidak akan bias menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih.⁵ Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pengertian lain tentang pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah: Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah⁶ Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perlu diketahui No.43 tahun 2014 di atas tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

⁵B Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (2011; Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol 1), h,. 57

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

2015 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷

Perangkat desa dan kepala desa tidak boleh ikut kampanye dikarenakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disana disebutkan kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu atau pilkada. Dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ASN dan kepala desa bahwa tidak boleh ikutserta dalam kampanye Pemilu caleg dan capres yang telah tertulis pada Pasal 280 UU Pemilu, menjelaskan bahwa pelaksanaan dan/tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa.⁸

Pemimpin dalam Islam dapat dikatakan *Ulul al-Amr*, istilah ini terdiri dari dua kata yaitu *Ulu* artinya pemilik dan *al-Amr* artinya perintah atau urusan. Kalau kedua kata tersebut digabung, maka artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna Imam dan *Ahli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuwan agama yang taat kepada Allah SWT.⁹

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

⁸ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelanggaran Dalam Kampanye Pasal 280 (2).

⁹ Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam* (Ladang Pustaka & Intimedia, Jakarta, 2002), h.. 27.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang zalim.” (QS. Al-Maidah 5:51)

Ayat di atas merupakan salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin dalam Islam yaitu seiman, adapun syarat untuk menjadi pemimpin yang telah ditetapkan menurut Islam sebagai berikut:

1. *Shidq*, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.
2. *Amanah*, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.
3. *Fathonah*, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.
4. *Tabligh*, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Misalnya harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan

transparan. Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

D. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wenang, tugas, dan tanggung jawab Lurah untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Yang adil dan jujur dikelurahan Tiuh Balak Pasar.
2. Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Lurah dalam menjaga rasa partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana peran Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Lurah untuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.
 - b. Untuk memberikan pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam lmu Hukum Tata Negara.
2. secara praktis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
 - b. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - d. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latarbelakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan¹⁰ yang berkaitan dengan peran Lurah dalam Pilkada perspektif Fiqh Siyasah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu¹¹ yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap peran Lurah dalam Pilkada perspektif Fiqh Siyasah.

2. Data dan Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan

¹⁰ Kartini kartono, *pengantar metedologi riset sosial* (Bandung, Alumni, 1986), h.33.

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)

observasi.¹² Dalam hal ini data diperoleh dari Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan melakukan interview di Kelurahan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian.¹³

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti.¹⁴ Yang dimaksud populasi disini adalah anggota-anggota perangkat kelurahan dan Masyarakat yang berjumlah 2.771 populasi.

b. Sampel dan teknik sampling

Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, cirri-ciri, tertentu, dan atas pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu..

¹²Kartini kartono, *pengantar metodelogi riset sosial* (Bandung, Alumni, 1986), h.33.

¹³Amirudin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

¹⁴SutrisnoHadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data¹⁵. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden¹⁶ dengan cara membawa daftar atau beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan sesi tanya jawab dilakukan secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik¹⁷. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan sebagai berikut:

¹⁵ Sugono, *Metode Penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung al-fabeta 2010), h. 137

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta : Andi Offset.1995), h. 192

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung Rosdakarya, 2010), h. 216

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai peran Lurah dalam Pilkada perspektif Fiqh Siyasah sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁸

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat¹⁹:

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.

¹⁸Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h.31

¹⁹Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab Jilid 6* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108

3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²⁰

Secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²¹

Redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²²

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), h.45

²¹ *Ibid.*, 109

²² *Ibid.*

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²³

Secara garis besar maka objeknya peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh siyasah* juga menggunakan *Ilm Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*. Secara umum, metode yang digunakan adalah *al-ijma'*, *al-Qiyas*, *alMashlahah al-Mursalah*, *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, *al-'Adah*, *alIstihsan* dan Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut:²⁴

1. *Al-Ijma'*

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.30.

²⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), h.54

Al-Ijma' merupakan kesepakatan konsensus para *fuqaha* ahli *fiqh* dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut *ijma' sukuti*.

2. *Al-Qiyas*

Qiyas dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari *umum al-ma'na* atau *Ilat* hukum. Dengan *qiyas*, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan *mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah pertimbangan penetapan menuju masalah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.

4. *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*.

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan *Fath al-Dzari'ah* adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* adalah alat dan

bukan tujuan, contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi.

5. *Al-'Adah*

Al-'Adah disebut juga *Urf*. *al-'Adah* terdiri dua macam, yaitu *al-'adah al sholihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara'* dan *al-'adah alfasidah* yaitu adat yang bertentangan *syara'*.

6. *Al-Istihsan*

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut *al-Sunnah* tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan *istihsan* untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

7. Kaidah-Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah* adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Fiqh Islam/ politik islam pada dasarnya bersumber dari al-Quran, al-Hadis serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa

nabi, khulafaurrasyidun, bani umayah dan abbasiah.pembukuan dan perumusan secara sistematis tentang *siyasah syar'iyah* baru pada masa khalifah al-Mu'tashim pada (218-228 bertepatan 833M-824M), dengan munculnya buku Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Prilaku Raja dalam pengaturan Kerajaan-Kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi' (227H atau 842M) di teruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19, seperti karangan Al Mawardi (364H-450H/975-1058) dengan bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyyah atas permintaan khalifah al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taymiyyah (661H-782H) al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'iyyah.²⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: '*ilm al-siyasah al-syai'ah, alfikr al siyasi al islami (Islamic political thought)* dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf , maka *al-fiqh al-siyasi* (fiqh politik), *al fiqh al-dusturi* (constitutional law), atau *fiqh al-dawlah* (hukum ketatanegaraan).²⁶

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.30

²⁶Ibid., 32

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sedangkan hubungan antara ilmu *fiqh* dan *Fiqh siyasah* dalam system hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²⁷

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁸

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi

²⁷Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.65.

²⁸Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), h.15.

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.²⁹

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan *syara'*. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.³⁰

Menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu³¹:

1. *Siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*);
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-

²⁹Abdurrahman Taj, *Al-siya>sah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h.10.

³⁰*Ibid.*, 11

³¹*Ibid*

Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

2. Macam-macam *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan macam *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima macam dan ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga macam pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi macam atau jenis *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup³²:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*);
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*);
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*);
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*); dan
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangknn Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan;
2. Administrasi negara;
3. Moneter; dan
4. Serta hubungan internasional.

³²Ibnu Syarif Mular, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h.36.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan;
2. Hubungan internasional; dan
3. Dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, Teungku Muhammad Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan;
2. Politik hukum;
3. Politik peradilan;
4. Politik moneter/ekonomi;
5. Politik administrasi;
6. Politik hubungan internasional;
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan; dan
8. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :³³

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

³³*Ibid.*, 41

2. politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.
3. Memilih Pemimpin.

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jumat, shalat jamaah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum.”

Menegakkan Imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibn Hazm menegaskan bahwa telah menjadi konsensus (kesepakatan bersama) seluruh *Ahlus sunnah*, *Murji'ah*, *Syi'ah* dan *Khawarij* akan kewajiban menegakkan imamah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 نَّزَعْنَم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
 dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
 tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
 Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
 kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
 akibatnya.” (Q.S An-Nisa“, 59)

Abu Ja'far Al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang
 paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang
 kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslaah”.
 Imam Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku,
 mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin,
 dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan
 ulama, karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk.
 Jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib”.³⁴

³⁴Rapung Samuddin, 78.

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka.” (HR Abu Daud dari Abu Hurairah dalam kitab Sunan Abu daud No. 2241)

يَكُونُونَ لثَلَاثَةٍ بِفَلَاةٍ مِنْ عَلَيْهِمَ امْرُؤًا إِلَّا الْأَرْضَ أَحَدَهُمْ
وَلَا يَحِلُّ

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berda di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.” (H.R Al-Imam Ahmad dalam kitab al-Musnad Imam Ahmad)

Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini bahwa Rasulullaah saw. mewajibkan atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya *insidentil*, yakni safar. Ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).³⁵

Sedangkan menurut *ijma'* ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia;
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin;

³⁵Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah Syar'iyah fi Islahir-ra'i war-Ra'iyah*

3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan *imamah* hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).³⁶

a. Syarat-syarat Pemimpin.

1. Syarat-syarat Pemimpin Menurut Islam

Membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para *fuqaha* menentukan syarat untuk menjadi Imam atau pemimpin.

Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin³⁷:

- a) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, berakal, berilmu dan adil;
- b) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman; dan
-) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.

Sedangkan menurut Al-Mawardi:

- a) Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal;
- b) Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad;
- c) Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya;

³⁶Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h.191-193

³⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), h. 78.

- d) Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat;
- e) Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum;
- f) Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun ekstern.³⁸

Menurut Imam Al-Ghazali:

- a) Dewasa atau akil baligh;
- b) Memiliki otak yang sehat;
- c) Merdeka dan bukan budak;
- d) Laki-laki;
- e) Pendengaran dan penglihatan yang sehat;
- f) Kekuasaan yang nyata;
- g) Hidayah;
- h) Ilmu pengetahuan; dan
- j) *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela)³⁹

Al-Ghazali berpendapat pula, yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat *wara'*, yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan *syari'at* Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam

³⁸Youngki Sendi Kristiannando, “*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*”. (Skripsi Strata 1 Sarjana Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 32

³⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), h. 78.

mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.⁴⁰

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la al-Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw, “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.⁴¹

Ibnu Taimiyah berpendapat dalam mengangkat atau memilih pemimpin menurut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mengangkat yang Ashlah (Paling layak dan sesuai)
2. Memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya.
- b. Cara Mengangkat Pemimpin.

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khilafah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*)⁴²:

1. Metode *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA)

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan.

⁴⁰*Ibid*,

⁴¹Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), 256.

⁴²*Ibid*,

AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

2. Wasiat

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya.

Majelis Syuro tersebut akan berembuk dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.

3. *Al Ghalabah* atau *Al Qahr*

Metode ini termasuk metode yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh

ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman kita hari ini sebagai “kudeta militer” dan sebagainya.

Para fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah berpendapat, bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula bai'at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi.

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer)nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah.


4. Ajakan Untuk Memilih Dirinya

Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih khalifah bagi kaum

muslimin maka menurut Ibnu Hazm boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju mencalonkan dirinya.

Ibnu Hazm melanjutkan menyatakan bahwa menemukan pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan padanya wajib mengikutinya, sah bai'atnya, tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. ketika khalifah Ustman bin 'Affan terbunuh.

Allah swt berfirman:



قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan. (Q.S Yusuf, 55)”

Al-Allamah Al-Alusi menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika keadaannya tidak dikenal. Demikian pula kebolehan meminta kekuasaan (jabatan) jika memang dirinya sanggup bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum syariat, kendati kekuasaan (jabatan) itu diminta dari tangan orang zalim atau kafir. Bisa saja meminta kekuasaan itu menjadi wajib atasnya jika penegakan sebuah kewajiban (dari Allah) tergantung pada kekuasaan yang ia menuntut tersebut.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ
وُكِّلْتَ ، وَإِنْ إِلَيْهَا أُعْطِيَتْ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652)

Kebiasaan yang diterapkan Rasulullah saw. dalam mengangkat para sahabat beliau untuk menduduki pos-pos tertentu, pastilah dia seorang imam shalat. Misalnya, terhadap pengangkatan seorang gubernur, Uthab bin Ussiad sebagai gubernur Makkah, Utsman bin Abil Ash sebagai gubernur Thaif, Ali, Muadz dan Abu Musa, masing-masing pernah menjadi gubernur di Yaman, demikian juga Amr bin Hazm yang diangkat Nabi saw. Sebagai gubernur Najran. Para gubernur ini adalah orang yang menjadi imam shalat diantara para sahabat, pelaksana hukum pidana, dan lain sebagainya yang menjadi tugas dari seorang komandan perang.

Sistem pengangkatan pejabat yang dicontohkan Rasulullah saw. ini telah pula diterapkan oleh para khalifah beliau, juga para khalifah Bani Umayyah dan sebagian Bani Abbasiyah. Bagaimanapun hal mendasar yang amat urgen dalam urusan agama adalah shalat dan jihad.

B. Peran Lurah

1. Menurut Perundang-Undang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.⁴³

Fungsi Kelurahan

- a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- d. Membina lembaga kemasyarakatan
- e. Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun

Tetangga

- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya⁴⁴

Adapun peran kelurahan dalam pilkada yaitu

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada;
- b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan pilkada;
- c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pilkada; dan
- d. Melakukan laporan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang atau bertahap dilakukan setiap hari.⁴⁵

Lembaga pemerintahan kelurahan terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan yaitu akan di jelaskan ini sebagai berikut:

- a. Kepala kelurahan

⁴³PP No. 73 Tahun 2005 Pasal 5, Tentang Kelurahan.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

⁴⁵<http://kpud-padangsidempuankota.go.id/2018/04/20/ini-peran-desk-pilkada-pemerintah-daerah-dalam-pilkada/> (Online, diakses 1 Oktober2020)

Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan. Kepala kelurahan disebut lurah. Lurah diangkat dari PNS yang memenuhi syarat oleh bupati atau wali kota atas usul camat. Syarat-syarat menjadi lurah seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 3 yaitu dibawah ini:

1. Memiliki pangkat atau golongan minimal penata (III atau C).
 2. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun;
 3. Memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
- b. Perangkat kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh para perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan diisi dari PNS yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas usul camat. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan, seksi-seksi dan jabatan fungsional. Dan berikut ini merupakan penjelasan mengenai perangkat kelurahan :

c). Sekretaris kelurahan

Sekretaris kelurahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti suratmenyurat, dan kearsipan. Selain itu, sekretaris kelurahan juga membantu lurah dalam urusan ketatausahaan.

d).Seksi-seksi

Seksi-seksi yang ada di kelurahan antara lain seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi pelayanan umum, serta keamanan dan ketertiban yang penjelasan sebagai berikut :

- Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan bertugas membantu lurah pembinaan, pemerintahan kelurahan dan pembinaan Rukun Warga (RW). Contohnya memfasilitasi pelaksanaan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT dan ketua RW.

- Seksi ketertiban dan keamanan

Seksi ini bertugas membantu lurah melaksanakan pembinaan ketertiban dan keamanan. Contohnya melaksanakan penertiban terhadap gangguan sosial.

- Seksi ekonomi dan pembangunan

Seksi ini bertugas membantu lurah dalam melaksanakan pengendalian dan pembinaan ekonomi pembangunan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat. Contohnya merencanakan pembangunan jalan dan jembatan.

- Seksi sosial kemasyarakatan

Seksi ini bertugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin.

e). Jabatan fungsional

Jabatan fungsional merupakan perangkat kelurahan yang memegang fungsi khusus bagi jalannya pemerintahan kelurahan. Jabatan fungsional membantu lurah untuk membina masyarakat. Adapun lebih

jelasnya struktur organisasi pemerintahan kelurahan berdasarkan lembaga pemerintahan di atas dapat kita uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Lurah
2. Seketaris Kelurahan
3. Seksi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Lembaga kemasyarakatan

Di kelurahan dapat dibentuk Lemabaga Kemasyarakatan. Pembentukan Lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Pasal 11, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang dimaksud Pasal 11 PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Fungsi lembaga kemasyarakatan yaitu:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan pergerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat.

Kewajiban lembaga kemasyarakatan berdasarkan Pasal 13 PP No. 73 Tahun 2005.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undang.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

- e. Membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Landasan hukum pemerintahan kelurahan adalah Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Kemudian UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah pada tingkat kelurahan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal.

2. Menurut *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah dusturiyah berkaitan mengenai hubungan Negara dengan masyarakat dan Negara yang mengatur tentang kemaslahatan ummat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dan dasar hukum suatu Negara dan ketentuan yang tidak tertulis. Pemahaman konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan dan kaidah perundang-undangan maupun sumber sumber penafsirannya. Sumber materil pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenaikemaslahatan ummat.⁴⁶

Al-Shultah al-Tanfiziyyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbis pada kemaslahatan ummat. Kebijakan pemerintah ini

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya media, 2001), h. 154.

merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Tugas *Shultah al-Tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (internasional). Pelaksana tertinggi adalah pemerintahan (Kepala negara) dibantu oleh pembantunya (kabinet dan dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan tuntutan situasi yang berbeda antar satu negara dengan negara islam lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan yang ada dibawah hirarki peraturan perundangundangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum *syara'* dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan *ulil amri* ini dikembalikan ke hukum *syara'* maupun Hadis Nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan hukum *syara'*.

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum”.

Menegakkan *Imamah* merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya *maslahat* dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibn Hazm menegaskan bahwa telah menjadi konsensus (kesepakatan bersama) seluruh Ahlus sunnah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij akan kewajiban menegakkan imamah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa“, 59)

Abu Ja'far Al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat.

Imam Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama“, karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib”.⁴⁷

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka.” (HR Abu Daud dari Abu Hurairah dalam kitab Sunan Abu daud No. 2241)

يَكُونُونَ لثَلَاثَةٍ بِفَلَاةٍ مِنْ أَمْرُوا إِلَّا الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ
وَلَا يَحِلُّ

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berda di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.” (H.R Al-Imam Ahmad dalam kitab al-Musnad Imam Ahmad)

Sedangkan menurut *ijma'* ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.

⁴⁷Rapung Samuddin, 78.

3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Partisipasi Masyarakat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum; menghadiri rapat umum; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.⁴⁸

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

⁴⁸Budiardjo, 2009

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Dikebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadifaktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.⁴⁹

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan

⁴⁹Komisi Pemilihan Umum (Online) tersedia: <https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/2016/02/03/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu/> diakses pada 26 Februari 2020

melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Menyelenggarakan Pemilihan Umum, termasuk Pilkada, telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Beberapa peraturan terkait adalah Peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung juga telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan UU No.8 Tahun 2005 sebagai Undang-undang, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.


Hampir semua daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik di Propinsi, maupun di kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang tersebut. Diaturinya pemilihan kepala daerah adalah merupakan pertanda bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional.

Konsensus tersebut bukan tidak memiliki perdebatan akademik. Perdebatan berkisar pada kata '*demokratis*' dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang membuka multi-tafsir, selanjutnya Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵⁰

D. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai peran Lurah dalam pilkada bukan lah pertama kali ditemukan, adapun beberapa penelitian yang menyangkut mengenai peran Lurah dalam pikada karena masih menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas dalam penelitian.

- 
1. Penelitian yang dilakukan A. Hirsan Mahasiswa Universitas Hasanuddin Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan pada skripsi yang berjudul “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013” menyimpulkan bahwa Kepala Desa berhasil konstituen pada pemilihan kepala daerah tahun 2013. Benth sosialisasi kepala desa berupa bantuan mesin produksi beberapa janji yang dikatakan jika paslon terpilih. Kepala desa berperan dibalik layar serta menempatkan adiknya sebagai pionir politik maka kepala desa setiap saat mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk disalurkan kepada adiknya hal ini merupakan strategi peranan kepala desa.

⁵⁰Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56

2. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Mohammad Nur Aris Shoim Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada skripsi “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” menyimpulkan bahwa Kepala Desa berperan penting dalam Pemilihan Umum dan berhasil meningkatkan partisipasi politik dari pemilihan umum sebelumnya dilakukan. Dan salah satu factor yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilihnya.
3. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Septio Widodo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada skripsi berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 menyimpulkan bahwa Kepala Desa melakukan pengarahan atau sosialisasi, membimbing masyarakat, menjalin kerjasama, dan selalu menerapkan gotong royong bersama yang menghasilkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari pemilihan umum sebelumnya. Dan ada juga penghambat antaranya kurangnya fasilitas dalam meningkatkan sosialisasi dan faktor ekonomi.

4. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Jordan Pratama Irawan Putra Universitas Jember Fakultas Hukum pada skripsi berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi” menyimpulkan bahwan kepala desa memiliki batasan dalam menyukkseskan pemilihan daerah, hanya sebatas pengenalan atau sosialisasi untuk ikut aktif memberikan hak suara pada pemilihan umum sebagai hak demokrasi. Pada dasarnya, kepala desa hanya unsure penyelenggara pemerintahan desa tidak boleh ikut seta atau ikut terlibat dalam pemilihan umum.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian lain. Karya ini bias jadi merupakan bentuk lanjutan dan melengkapi karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah didalam penelitian ini secara khusus menggunakan Analisis *Fiqh Siyasa* dikaji lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung PT. syugma Examedia Arkenleema, 2013)

B. Al-Hadist.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Ahmad bin Hambal*, (Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998)

Al-Imam Al-Hafidz Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats As-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, (Daar Ibnu Hazm, 1998)

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Beirut Publishing, 2014)

C. Fiqh dan Ushul Fiqh.

A. Dijazuli, *fiqh siyasah* (Prenada Media, Jakarta. 2000)

Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993)

Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007)

Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)

Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah Syar'iyah fi Islahir-ra'i war-Ra'iyah*

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

D. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah

E. Buku- Buku dan Pengarang.

Amirudin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

[B Arianto](#), *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (2011; Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol 1)

Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab Jilid 6* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986)

Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam* (Ladang Pustaka & Intimedia, Jakarta, 2002)

Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Kartini kartono, *pengantar metedologi riset sosial* (Bandung, Alumni, 1986)

Koentjara ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)

Lexi J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Suguono, *Metode Penelitian Kualitatifdan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2004)

Youngki Sendi Kristiannando, “*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*”. (Skripsi Strata 1 Sarjana Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014)

F. Online

Komisi Pemilihan Umum (Online) tersedia: <https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/2016/02/03/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu/> (diakses pada 26 Februari 2020)

[Partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan pemilu](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all) (Online) tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all> (11 September 2019)

<http://kpud-padangsidempuankota.go.id/2018/04/20/ini-peran-desk-pilkada-pemerintah-daerah-dalam-pilkada/> (1 Oktober 2020)